

## Kolaborasi Multisektoral dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah

Multisectoral Collaboration in Addressing Out-of-School Children

✉ Nurul Azizah, Dyah Widowati, Edi Yuswantoro, Nur Rachma Wulan,  
Frengki Candra Irawan, Diah Purwaning Sulistya Rini  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

### ARTICLE INFO

*Kolaborasi Multisektoral,  
Penanganan Anak Tidak  
Sekolah,  
Kabupaten Kediri.*

Article History:

Received : July 8, 2025

Accepted : Dec 22, 2025

Publish : Dec 29, 2025

### ABSTRAK:

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Kediri, menilai efektivitas program bantuan sosial dalam penanganan ATS, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut kebijakan. Penelitian menggunakan metode campuran melalui wawancara dengan OPD terkait, FGD, studi dokumentasi, dan penyebaran kuesioner. Instrumen penelitian mencakup pedoman wawancara dan kuesioner yang disusun berdasarkan sumber relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama ATS meliputi kondisi ekonomi keluarga yang lemah, rendahnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan, praktik pernikahan dini, serta hambatan geografis. Berbagai intervensi seperti pendidikan alternatif, bantuan biaya, dan pendampingan sosial telah dilakukan, namun efektivitasnya masih perlu diperkuat. Diperlukan kolaborasi multisektoral lintas OPD untuk meningkatkan penanganan ATS. Rekomendasi kebijakan meliputi penguatan pendataan terpadu berbasis komunitas, peningkatan literasi pendidikan, pemanfaatan pendidikan nonformal yang lebih fleksibel, kerja sama dengan LSM dan dunia usaha, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan.*

### ABSTRACT:

*This study aims to analyze the factors influencing the number of Out-of-School Children (OSC) in Kediri Regency, assess the effectiveness of social assistance programs in addressing OSC, and provide policy recommendations for further action. The research employs a mixed-methods approach through interviews with relevant local government agencies (OPD), focus group discussions (FGDs), documentation review, and questionnaire distribution. The research instruments include interview guidelines and questionnaires developed based on relevant and credible sources. The findings indicate that the main causes of OSC include weak household economic conditions, low awareness of the importance of education, early marriage practices, and geographical barriers limiting access to schools. Although various interventions such as alternative education programs, financial assistance, and social support have been implemented, their effectiveness still needs to be strengthened. Multisectoral collaboration across government agencies is required to enhance OSC handling efforts. Policy recommendations include strengthening community-based integrated data systems, increasing educational literacy and outreach, expanding flexible non-formal education options, fostering collaboration with NGOs and the private sector, and ensuring continuous monitoring and evaluation.*

### How to Cite:

Azizah, N., Widowati, D., Yuswantoro, E., Wulan, N. R., Irawan, F. R., Rini, D. P. S. (2025). Kolaborasi Multisektoral dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 19(2), 189-200. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i2.822>.

✉ Corresponding author :

Address : Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar,  
Surabaya, Jawa Timur 60294

Email : [nurulazizah.adbis@upnjatim.ac.id](mailto:nurulazizah.adbis@upnjatim.ac.id)

Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan is licensed under a  
Creative Commons Attribution 4.0 International License



Hal. 189-200

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kualitas pendidikan berperan penting dalam membentuk individu yang produktif, inovatif, serta mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kemajuan pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa (Nurhayati, 2018). Namun demikian, permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan nasional dan berdampak langsung terhadap akses serta keberlanjutan pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 persentase penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 9,36 persen atau sekitar 25,90 juta jiwa. Kondisi ekonomi yang lemah menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sehingga meningkatkan risiko anak putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (BPS, 2024).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperluas akses pendidikan, salah satunya melalui penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Upaya tersebut meliputi pendataan ATS secara akurat dan terjangkau, pendampingan berkelanjutan, revitalisasi gerakan kembali bersekolah, serta penyediaan layanan pendidikan yang inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), pekerja anak, anak yang berhadapan dengan hukum, anak terlantar, anak jalanan, serta anak yang berada di wilayah terdampak bencana. Meskipun demikian, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata masih menghadapi berbagai kendala struktural dan sosial, salah satunya tingginya jumlah ATS.

Lebih lanjut, Bappenas (2020) mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan dan pelatihan dengan akses yang disediakan oleh pemerintah. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) keterbatasan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan di sejumlah daerah; (2) rendahnya relevansi dan mutu pendidikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat; (3) hambatan sosial ekonomi termasuk kemiskinan; serta (4) adanya persepsi negatif terhadap pentingnya pendidikan dan faktor sosial budaya lainnya.

Tingginya angka anak putus sekolah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah ATS, sehingga diperlukan intervensi pemerintah yang kuat dalam perspektif tata kelola pemerintahan (*governance*). Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif untuk menekan angka ATS, khususnya pada kelompok usia wajib belajar 7–18 tahun. Prasetyo (2016) menyatakan bahwa anak tidak sekolah akibat putus sekolah umumnya berasal dari keluarga miskin. Temuan ini sejalan dengan Rumberger (2011) yang mengklasifikasikan penyebab putus sekolah ke dalam dua perspektif utama, yaitu faktor individu dan faktor institusional. Faktor individu mencakup nilai, sikap, dan perilaku siswa, sedangkan faktor institusional bersifat struktural, seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, komunitas, serta pengaruh teman sebaya.

Berdasarkan kajian tersebut, tantangan penanganan ATS di Kabupaten Kediri tergolong cukup besar. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 1.078 siswa lulusan SD yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP serta 3.569 lulusan SMP yang tidak melanjutkan

ke jenjang SMA di Kabupaten Kediri. Kondisi ini menunjukkan masih tingginya fenomena Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) yang berpotensi meningkatkan angka ATS. Permasalahan ATS di Kabupaten Kediri menjadi perhatian serius karena berkaitan erat dengan kualitas pendidikan masyarakat dan berimplikasi langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Kediri tercatat sebesar 75,18, masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Timur yang mencapai 75,35. Rendahnya capaian pendidikan akan berdampak pada kualitas SDM, produktivitas tenaga kerja, serta daya saing daerah.

Oleh karena itu, permasalahan ATS di Kabupaten Kediri perlu dikaji secara mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya secara komprehensif. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan dan strategi penanganan ATS yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga mampu menurunkan angka ATS serta meningkatkan kualitas generasi muda di Kabupaten Kediri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian mengambil judul “Kajian Strategi Penguatan Kebijakan Penanganan Anak Tidak Sekolah Di Kabupaten Kediri”. Adapun tujuan penelitian meliputi Meneliti faktor-faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap angka tidak sekolah. Menganalisis efektivitas pro-gram bantuan sosial: Misalnya, bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar) terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah. Mengevaluasi dan merekomendasikan tindak lanjut penanganan anak tidak sekolah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Urgensi Pendidikan dan Peran Pemerintah Kabupaten**

Pendidikan memiliki relevansi yang sangat penting dalam upaya pembangunan bangsa dan negara. Hal ini dikarenakan pendidikan adalah instrumen utama peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang

mana sumber daya manusia ini adalah lokomotif kemajuan bangsa dan negara melalui pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, Kunandar (2007) menjelaskan bahwa “manusia adalah pelopor pembangunan dan karenanya investasi dalam SDM merupakan suatu keharusan dalam pembangunan.” Pendapat ini tentu sangat relevan karena dalam paya pembangunan, sumber daya manusia adalah sumber daya yang terpenting untuk mengolah dan menatur sumber daya lainnya. Oleh sebab itu, investasi di bidang SDM untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas mutlak diperlukan demi penyelesaian masalah bangsa dan tercapainya tujuan nasional. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten/kota, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kediri harus memastikan bahwa wajib belajar 7 tahun (pendidikan dasar) terselenggara dengan baik. Namun, data menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kasus anak tidak sekolah yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius.

### **Penanganan Anak Tidak Sekolah**

Fenomena Anak Tidak Sekolah merupakan fenomena yang mengancam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kediri. Anak Tidak Sekolah (ATS) dikategorikan sebagai anak usia 6 s.d. 21 tahun yang tidak bersekolah karena alasan ekonomi, sosial, kesehatan. Selain itu, mereka yang pernah sekolah dan berhenti di tengah proses belajarnya (putus sekolah) karena berbagai alasan seperti kesulitan ekonomi, dan sosial. Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak-anak usia sekolah yang tidak mengikuti pendidikan formal di sekolah, baik karena belum pernah masuk sekolah, putus sekolah di tengah jalan, atau tidak melanjutkan pendidikan

setelah menyelesaikan jenjang tertentu. Fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Berikut terdapat beberapa strategi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan ATS: a. Program Wajib Belajar dan Pendidikan Gratis: Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program Wajib Belajar 12 tahun yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan dasar dan menengah. b) Bantuan Siswa Miskin: Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah salah satu inisiatif yang memberikan bantuan kepada siswa dari keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan. c) Sekolah Jarak Jauh dan Pendidikan Nonformal: Di daerah terpencil, penyediaan fasilitas sekolah jarak jauh atau pendidikan nonformal seperti Paket A, B, dan C menjadi solusi untuk menjangkau anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah formal. d) Kesadaran dan Kampanye Pendidikan: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan merupakan langkah penting dalam menekan angka ATS. e) Intervensi Khusus untuk Anak Perempuan dan Disabilitas: Mengatasi hambatan yang dihadapi anak perempuan dan anak-anak dengan disabilitas memerlukan pendekatan yang lebih inklusif. f) Penghapusan Pernikahan Dini: Untuk menekan angka pernikahan dini yang berkontribusi terhadap ATS. g) Kolaborasi Multisektoral: Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi internasional, dan masyarakat sipil harus bekerja sama dalam menanggulangi ATS. Dukungan dari sektor swasta juga bisa membantu melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang pendidikan.

### **Kolaborasi Multisektor**

Menurut *YouthPower*, pendekatan multi-sektor adalah kolaborasi yang disengaja antara berbagai kelompok pemangku kepentingan (misalnya, pemerintah,

masyarakat sipil, dan sektor swasta) serta sektor-sektor (misalnya, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi) untuk bersama-sama mencapai hasil kebijakan. Dengan melibatkan berbagai sektor, mitra dapat memanfaatkan pengetahuan, keahlian, jangkauan, dan sumber daya mereka, serta mendapatkan manfaat dari kekuatan gabungan dan beragam saat mereka bekerja menuju tujuan bersama untuk menghasilkan hasil kesehatan yang lebih baik. Kolaborasi multisektor dalam penanganan anak tidak sekolah merujuk pada kerja sama terencana dan terkoordinasi antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas sosial, LSM, komunitas, dan sektor swasta untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan. Dalam konteks anak tidak sekolah, kolaborasi multisektor mencakup: a. Pemerintah daerah: Menyusun kebijakan dan menyediakan anggaran. b. Dinas Pendidikan: Mengidentifikasi dan memfasilitasi anak kembali ke sekolah. c. Dinas Sosial: Memberikan bantuan sosial dan intervensi keluarga. d. LSM dan komunitas: Melakukan advokasi, pendampingan, dan edukasi masyarakat. e. Sektor swasta: Menyediakan dukungan CSR, pelatihan vokasional, atau beasiswa.

### **METODE PENELITIAN**

Lokus penelitian ini berada di beberapa kecamatan di Kabupaten Kediri yang telah dipetakan berdasarkan wilayah dan desa sasaran. Lokasi penelitian meliputi Kecamatan Ngancar, yaitu Desa Bedali dengan jumlah populasi sebanyak 81 orang; Kecamatan Kepung yang mencakup Desa Kebonrejo sebanyak 89 orang dan Desa Kampung Baru sebanyak 50 orang; Kecamatan Plosoklaten yang meliputi Desa Pranggang sebanyak 68 orang dan Desa Punjul sebanyak 64 orang; Kecamatan Mojo yang mencakup Desa Ngadi sebanyak 68 orang dan Desa Ngetrep

sebanyak 36 orang; serta Kecamatan Pare, yaitu Desa Gedangsewu dengan jumlah populasi sebanyak 100 orang. Dengan demikian, total populasi dalam penelitian ini berjumlah 556 orang.

Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 0,1, sehingga diperoleh jumlah sampel minimal sebanyak 85 responden. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini berhasil mengumpulkan sebanyak 102 responden. Penelitian dilaksanakan selama 90 hari, yaitu mulai tanggal 17 Februari 2025 hingga 16 April 2025.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian campuran (mixed methods), yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia secara mendalam dalam konteks alamiah (Moleong, 2019). Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur fenomena sosial secara objektif melalui data numerik dan analisis statistik (Sugiyono, 2019).

Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi lapangan dan focus group discussion (FGD). Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai instansi dan sumber resmi yang terkait di Kabupaten Kediri, antara lain Cabang Dinas Pendidikan

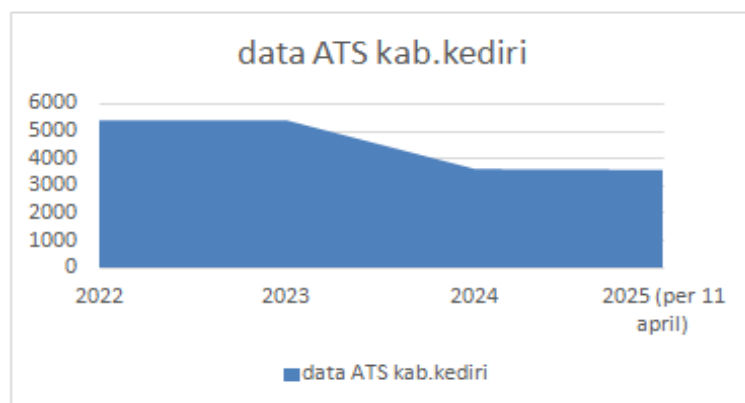
Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Kediri, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum, Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (P2KB), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Dinas Kesehatan. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik triangulasi untuk data kualitatif yang berasal dari hasil wawancara dan FGD, sedangkan data kuantitatif dianalisis menggunakan perangkat lunak Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kediri: Analisis dan Permasalahan Pendataan

Data pada gambar 1 menunjukkan adanya upaya penanggulangan yang signifikan, beberapa laporan dari lapangan mengindikasikan bahwa data resmi yang tercatat di Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual.

Jika melihat data tahun 2025 sampai dengan april yang menurun namun belum dapat mencerminkan kondisi actual. Hal tersebut diperkuat hasil temuan tim



Sumber: Data Diolah, 2025

**Gambar 1**

**Grafik Jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kediri Tahun 2022-2025**

peneliti di lapang, diperoleh banyak data yang tidak relevan antara di pusdatin dengan daerah seperti beberapa individu sudah pindah domisili, ada yang tidak diketahui keberadaannya, sampai dengan tim daerah yang memegang lebih dari bidang. Dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian data anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri.

Ketidaksesuaian data anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri, dapat dikarenakan: Pertama, keterlambatan dalam pemutakhiran data merupakan kendala yang cukup signifikan. Data yang bersumber dari instansi pemerintah cenderung mengalami jeda waktu antara proses pendataan di lapangan dan input ke dalam sistem pusat, sehingga mengakibatkan adanya gap informasi yang memengaruhi keakuratan angka ATS. Kedua, perbedaan metodologi pendataan antara instansi pusat dan pelaksana lapangan juga menjadi penyebab ketidaksesuaian data. Pusdatin umumnya mengandalkan data administratif dari Dinas Pendidikan, Dukcapil, dan lembaga formal lainnya, sementara pendataan di lapangan. Ketiga, terdapat sejumlah anak yang tidak terdata secara resmi, terutama mereka yang tidak memiliki dokumen kependudukan, ting-gal berpindah-pindah, atau berasal dari keluarga rentan. Keempat human error dalam proses input data serta kurangnya koordinasi antar instansi memperparah ketidaktepatan data. Informasi dari sekolah, dinas sosial, dan perangkat desa sering kali tidak terintegrasi secara optimal. Terakhir, faktor mobilitas penduduk turut menyulitkan pelacakan anak tidak sekolah.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kediri.**

Secara umum hasil rekap data pengambilan sampel di beberapa kecamatan di kabupaten Kediri diperoleh data sebesar 102 individu yang disinkronisasi antara data dari pusdatin dengan data di kelurahan masing-

masing desa. Hasil besaran rata-rata masing factor diperoleh seperti pada tabel 1. Pada tabel tersebut diperoleh angka rata-rata tertinggi terdapat pada factor ekonomi sebesar 3.276 dibandingkan factor lain seperti social, psikologi dan keluarga. Namun temuan di lapangan menunjukkan bawa factor ekonomi tersebut dapat mempengaruhi factor lain. Sehingga tidak dapat dipisahkan antara masing-masing factor. Meskipun terdapat beberapa daerah yang ditemui bahwa factor ekonomi bukan masalah utama namun secara general faktor ekonomi masih mendominasi alasan anak tidak sekolah di kabupaten Kediri. Beberapa daerah yang ditemui tim peneliti bahwa factor ekonomi bukan permasalahan utama seperti di kecamatan kepung dengan sampel di desa pranggan dan desa ngetrep, ditemui bahwa sebagian besar menjadi petani yang berhasil namun kondisi geografi desa yang jauh dari sekolah sehingga motivasi anak dan orang tua untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi relative rendah. Sedangkan daerah lain seperti kecamatan pare, plosoklaten dan Mojo didominasi factor ekonomi yang menyebabkan motivasi anak dan orang tua dalam memprioritaskan pendidikan relative rendah dan lebih mendorong anaknya untuk bekerja setelah selesai menempuh pendidikan SMP sederajat.

Faktor kedua yang dominan ada pada faktor sosial, dimana temuan dilapang menunjukkan bahwa masih banyak terdapat pernikahan dini, baik dikarenakan kesedaran maupun keterpaksaan, karena kecelakaan dan lain sebagainya, masih sering ditemui, hal tersebut juga berpengaruh terhadap motivasi dan psikologi anak dan orang tua dalam mendorong untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Factor ketiga yaitu factor psikologi yang menyangkut motivasi diri seseorang dalam melanjutkan pendidikan. Di kabupaten Kediri beberapa daerah memiliki karakter

Tabel 1. Hasil Rata-rata Faktor Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kediri

		AVE.E	AVE.S	AVE.PSI	AVE.K	AVE.SK
N	Valid	102	102	102	102	102
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		3.2745	2.8137	2.7353	2.6765	1.8235
Median		4.0000	3.0000	3.0000	2.0000	2.0000
Mode		4.00 <sup>a</sup>	2.00	2.00	2.00	2.00
Skewness		-.302	.382	.149	.580	1.578
Std. Error of Skewness		.239	.239	.239	.239	.239
Sum		334.00	287.00	279.00	273.00	186.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Sumber: Data Diolah, 2025

yang berbeda mulai dari pengaruh social dan keluarga sehingga motivasi diri untuk lanjut sekolah rendah, seperti di kecamatan pare daerah yang dominan anak tidak sekolah adalah gedangsewu dimana daerah tersebut dominan dengan orang yang bekerja sebagai pengemis dan PSK. Dengan kondisi keluarga yang kurang mendukung factor psikologi anak jadi dominan, meskipun tempat sekolah dan tawaran beasiswa sudah banyak ditawarkan. Pada factor kelurga dan sekolah menjadi factor yang paling kecil dibanding factor lain, namun hal tersebut perlu menjadi perhatian karena bisa jadi factor keluarga merupakan factor privasi yang tidak semua data bisa dibuka dan di informasikan secara terbuka.

### Analisa Data Kualitatif di Lapang Faktor-faktor Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kediri

Analisa data kualitatif dalam penelitian ini ditujukan untuk mengolah data yang memiliki keunikan/kekhasan sehingga tidak dapat dimasukkan dalam sub-sub indikator dalam kuesioner atau karena jumlah fenomena tersebut yang terlalu sedikit sehingga tidak signifikan ketika dianalisa menggunakan pendekatan kuantitatif. Namun, meskipun jumlah fenomena tersebut terlalu sedikit, akan tetapi tetap perlu untuk ditindaklanjuti oleh para stakeholders pendidikan di Kabupaten Kediri. Data kualitatif tersebut,

dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara/FGD kepada pihak-pihak terkait seperti kecamatan dan desa serta analisa dokumen yang a langsung di desa yang menjadi lokasi penelitian. Pertama, Permasalahan yang sangat serius dalam tata kelola data terkait anak tidak sekolah (ATS) adalah adanya data yang bermasalah. Ada beberapa kategori data bermasalah. **Pertama**, kategori “data tidak ditemukan”. Data ini terkait dengan adanya data anak tidak sekolah (ATS) dari PUSDATIN yang menyebutkan adanya anak tidak sekolah yang lengkap (nama, NIK, alamat, jenis kelamin, dll). **Kedua**, permasalahan ekonomi yang khas, yaitu anak “dipaksa” bekerja oleh orang tua. Salah satu lokasi di Desa Gedangsewu adalah adanya anak yang dipaksa orang tuanya untuk bekerja, karena alasan ekonomi. Ekonomi keluarga yang dapat dikatakan kurang, menyebabkan orang tua “memaksa” anak-anaknya untuk bekerja mencari uang/penghasilan guna membantu perekonomian keluarga. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh anak di lokasi ini seperti menjadi pengemis dan pengamen. Bahkan kasus yang agak ekstrem terjadi dalam 1 keluarga ada 3 anak yang dikeluarkan oleh orang tuanya untuk menjadi pengamen.

**Ketiga**, kasus bullying yang mendorong anak tidak mau sekolah, beberapa desa

yang menjadi lokasi penelitian terdapat kasus bullying yang menjadi alasan anak tidak mau bersekolah dan akhirnya putus/tidak bersekolah. Adapun permasalahan ini terjadi di desa Kebonrejo dan desa bedali. Contoh kasus bullying yang terjadi adalah karena kondisi seorang anak yang dianggap nakal dan gendut sehingga anak tersebut mendapat bullying di sekolahnya. **Keempat**, permasalahan anak dengan kondisi fisik dan jiwa anak. Beberapa kasus anak tidak sekolah/putus sekolah karena anak tersebut mengalami disabilitas terjadi di beberapa lokasi misalnya di Desa Kabonrejo 4 orang (disabilitas fisik), di bedali 3 orang (disabilitas fisik) dan ringinrejo 1 orang (keterbelakangan mental). **Kelima**, wilayah yang membutuhkan unit sekolah baru. Penelitian lapangan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan kepung, khususnya di desa kebonrejo, desa kampung baru dan desa besowo menunjukkan adanya permasalahan serius yang dihadapi oleh anak-anak usia sekolah (SMP) di sana, yaitu jauhnya akses sekolah SMP dari desa tempat tinggal. Sekolah terdekat justru berada di Kabupaten Malang, yaitu di kasembon. Akses yang jauh ini menyebabkan anak-anak harus mengendarai sepeda motor dan melewati jarak yang cukup jauh. **Keenam**, keikutsertaan anak dalam kelompok/komunitas “anak jalanan”. Beberapa desa yang menjadi lokasi penelitian ditemukan kasus anak berhenti bersekolah karena anak memilih untuk “hidup dijalan” dengan komunitas “anak jalanan”. Masalah ini terjadi pada anak di beberapa desa, yaitu di kebonrejo dan pranggang. Anak yang ikut serta dalam kelompok / komunitas anak jalanan cenderung tidak minat bersekolah dan akhirnya putus sekolah. **Ketujuh**, Pernikahan dini. Kasus pernikahan dini terjadi hampir di seluruh desa yang menjadi objek penelitian ini. Di desa ngadi terjadi 4 kasus, 2 kasus, kebonrejo 1 kasus. Kasus pernikahan dini juga terjadi di desa punjul dan ngetrep, bahkan di ngetrep angka putus

sekolah utamanya disebabkan pernikahan dini meskipun angka pasti belum berhasil diperoleh.

### **Kolaborasi Multisektor dalam Mendukung Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kediri**

Berdasarkan hasil pendataan dan observasi lapangan yang dilakukan oleh tim peneliti bersama tim lintas sektor, ditemukan bahwa masih terdapat sejumlah anak usia sekolah yang belum mengakses pendidikan formal maupun nonformal. Faktor penyebab utama anak tidak sekolah (ATS) meliputi kondisi ekonomi keluarga, kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, pernikahan usia anak, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil dan sulit dijangkau. Dari data yang dihimpun selama masa penelitian di lapang, terdapat setidaknya 102 sampel yang berhasil didata anak yang tergolong dalam kategori ATS, dengan sebaran tertinggi berada di wilayah Kecamatan Mojo, Kepung, dan Pare. Sebagian besar dari mereka merupakan anak usia 7–18 tahun yang belum pernah mengenyam pendidikan formal atau putus sekolah pada jenjang SD dan SMP.

Selain itu, evaluasi juga mencatat bahwa intervensi yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir, seperti program pendampingan sosial, pendidikan kesetaraan, dan beasiswa bantuan pendidikan, menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Sekitar 45% anak yang sebelumnya tercatat sebagai ATS telah berhasil dikembalikan ke jalur pendidikan melalui program Kejar Paket melalui program kegiatan belajar masyarakat (PKBM) terdekat dan integrasi dengan pesantren berbasis pendidikan kesetaraan. Namun demikian, tantangan dalam hal pendataan yang belum sepenuhnya akurat dan koordinasi antar-instansi yang masih bersifat sektoral menjadi hambatan dalam pencapaian target penanganan ATS secara menyeluruh. Penanganan anak tidak sekolah merupakan

tanggung jawab bersama yang memerlukan pendekatan lintas sektor, kolaboratif, dan berbasis data. Melalui langkah-langkah strategis yang terintegrasi, diharapkan Kabupaten Kediri dapat mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh anak usia sekolah.

Berdasarkan hasil observasi, program-program penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat

dan pemerintah provinsi relatif berjalan efektif dalam implementasinya. Namun demikian, program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaannya. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap program-program penanganan ATS

Tabel 2. Rekomendasi Umum dan Pelaksanaan dalam Bentuk Kegiatan

No.	Rekomendasi	Penanggung Jawab Utama	Mitra Pendukung	Bentuk Kegiatan
1	Penguatan Sistem Pendataan Terpadu Berbasis Komunitas	Dinas Pendidikan, Dukcapil, DPMPD	RT/RW, Kader Posyandu, Bappeda, LPM	- Integrasi data ATS - Pelatihan kader komunitas - Sistem digital pelaporan berbasis wilayah
2	Peningkatan sosialisasi dan literasi pendidikan kepada masyarakat	Dinas Pendidikan & Kominfo	Tokoh masyarakat, media lokal, lembaga keagamaan	- Kampanye sadar pendidikan - Talkshow radio/TV lokal - Forum warga
3	Pemanfaatan pendidikan nonformal yang fleksibel	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	PKBM, SKB, NGO pendidikan, Karang Taruna	- Kelas paket A/B/C - Kelas keterampilan - Pendampingan belajar fleksibel
4	Optimalisasi peran satuan tugas penanganan ATS	Satgas Penanganan ATS (lintas sektor)	Dinas Sosial, Pendidikan, Puskesmas, Kecamatan	- Pelatihan manajemen kasus - Supervisi lapangan - Penyediaan anggaran kegiatan lapangan
5	Kolaborasi aktif dengan LSM dan dunia usaha	Bappeda & Dinas Pendidikan	CSR perusahaan, LSM pendidikan, forum CSR daerah	- Program beasiswa & pelatihan kerja - Penyediaan sarana pendidikan - Pendanaan program ATS
6	Monitoring dan evaluasi berkelanjutan	Bappeda & Inspektorat	Dinas terkait, Perguruan Tinggi, LSM evaluasi	- Survei tahunan ATS - Forum evaluasi lintas sektor - Laporan rutin berbasis indikator kunci

Sumber : Data Diolah, 2025

menyebabkan minimnya inisiatif orang tua dan anak untuk kembali bersekolah. Temuan ini menegaskan bahwa diperlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat melalui penguatan kolaborasi multisektor, khususnya dalam aspek sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat, agar kebijakan penanganan ATS di Kabupaten Kediri dapat diimplementasikan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Kediri masih menjadi tantangan serius yang memerlukan penanganan lintas sektor secara berkelanjutan. Faktor utama yang menyebabkan anak tidak bersekolah meliputi kondisi ekonomi keluarga, kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, pernikahan usia anak, serta keterbatasan akses geografis. Meskipun telah terdapat berbagai program intervensi, seperti pendidikan kesetaraan, pemberian bantuan pendidikan, dan pendampingan sosial, cakupan dan dampaknya masih perlu diperluas serta ditingkatkan. Koordinasi antarinstansi, akurasi pendataan, serta keterlibatan masyarakat belum optimal, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan program penanganan ATS secara menyeluruh. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berikut adalah sejumlah rekomendasi umum yang dapat dijadikan acuan tindak lanjut, a. Penguatan Sistem Pendataan Terpadu Berbasis Komunitas, guna memastikan identifikasi ATS dilakukan secara akurat dan berkesinambungan. b. Peningkatan sosialisasi dan literasi pendidikan kepada masyarakat, dengan melibatkan tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, serta media lokal. c. Pemanfaatan pendidikan nonformal yang fleksibel, sebagai alternatif bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena kondisi

tertentu. d. Optimalisasi peran satuan tugas penanganan ATS, melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta dukungan anggaran yang memadai. e. Kolaborasi aktif dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha, dalam bentuk pendanaan, fasilitas, dan program pemberdayaan berbasis pendidikan. f. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan, untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan adaptif terhadap perubahan dinamika sosial. Rekomendasi umum di atas tentu perlu diperkuat dengan pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi khusus/teknis seperti yang telah diuraikan sebelumnya untuk masing-masing organisasi perangkat daerah. Dengan pelaksanaan rekomendasi umum dan khusus tersebut secara konsisten dan terintegrasi, diharapkan Kabupaten Kediri mampu menurunkan jumlah anak tidak sekolah secara signifikan, serta mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan terimakasih banyak pada badan riset dan inovasi daerah (BRIDA) pemerintah kabupaten Kediri yang telah memberi kepercayaan pendanaan pada seluruh proses penelitian ini. Ucapan terimakasih juga pada universitas pembangunana nasional veteran Jawa Timur yang banyak memberi dukungan pada tim peneliti serta BRIDA provinsi sebagai pengarah dalam pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azani, M., Muhafidin, D., & Utami, D. N. (2024). Strategi Kolaboratif Multisektor dalam Mengatasi Perundungan Anak di Kota Bogor. *Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*, 5(1), 45–59.
- BPS. (2024). *Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal, 2022-2023*. Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kabupaten Kediri dalam Angka 2023*. Kediri: BPS Kabupaten Kediri.
- Bappenas. (2021). *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Anak Tidak Sekolah 2021–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. (2024). *Laporan Tahunan Program Penanganan Anak Tidak Sekolah*. Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
- Dinas Pendidikan. (2024). *Anak Tidak Sekolah*. Di akses pada tanggal 18 januari 2025. <https://disdik.hsu.go.id/2024/10/10/anak-tidak-sekolah-ats/>.
- Fadli, R. (2021). *Collaborative Governance dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hastuti, D., & Purnamasari, R. (2020). Faktor Sosial dan Budaya dalam Pendidikan: Studi pada Anak Putus Sekolah di Jawa Timur. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 6(1), 34–45.
- Kemendikbud RI. (2021). *Data Statistik Pendidikan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah*. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Laporan Profil Anak Tidak Sekolah di Indonesia*. Jakarta: Pusdatin Kemendikbudristek.
- Ketik.co.id. (2023). 5.375 *Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kediri, Ini Penyebabnya*. Diakses dari: <https://ketik.co.id>.
- Lanawaang, J. J., & Mesra, R. (2023). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Kelurahan Tuutu Analisis Pasal 31 Ayat 1, 2, Dan 3 UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(2), 1375-1381. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i2.5103>.
- Lingkar Wilis. (2022). *Ribuan Anak di Kabupaten Kediri Putus Sekolah*. Diakses dari: <https://lingkarwilis.com>.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Noviani, L., Budiarti, A. C., Tuhana, T., & Setyawati, M. (2023). Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Sragen. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, 7(1), 92–103. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v7i1.379>.
- Kemendikbud RI. (2017). *Kemendikbud Rumuskan Strategi untuk Merangkul Anak Tidak Sekolah Melalui Program Indonesia Pintar*. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia.
- Priyanto, B., Wulandari, T., & Hidayat, N. (2022). Dashboard Inklusif Pendidikan: Inovasi Pendataan Terintegrasi di Kota Semarang. *Jurnal Teknologi Informasi Pemerintahan*, 5(3), 203-215.

- Puslapdik. (2022). *Fakta...PIP Mampu Turunkan Angka Putus Sekolah*. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
- Radar Kediri. (2024). *Pemkab Targetkan Zero Anak Putus Sekolah Tahun Ini di Kabupaten Kediri*. Diakses dari: <https://radarkediri.jawapos.com>.
- Sanajya, benni. 2022. *Problematika anak putus sekolah*. Diakses pada tanggal 20 januari 2025 <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--problematika-anak-putus-sekolah>.
- Setyawan, R. (2021). Integrasi Data Pendidikan dan Sosial dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 9(2), 134-145.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2021). *Pengantar Sosiologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Masyarakat*. Refika Aditama.
- Suhartono, A., & Widodo, M. (2020). Model Desa Peduli Pendidikan sebagai Upaya Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 88-99.
- Suharyadi, & Haryanto, A. (2021). Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Partisipasi Sekolah Anak Usia Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 14(2), 112–121.
- Tim Peneliti Universitas Bosowa. (2023). Program Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PP-PATS) Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Lingkungan Sosial*, 8(2), 102–115.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Butkeviciene, Vitalija, Jurgita Stravinskiene, Ausra Rutelione. (2008). Impact of Consumer Package Communication on Consumer Decision Making Process. *Journal of Engineering Economics 1*, 57-65.
- UNESCO Institute for Statistics. (2015). *Out-of-School Children*. [Online] Available at: [uis.unesco.org](http://uis.unesco.org).
- UNESCO. (2020). *Education for All Global Monitoring Report: Reaching the Unreached*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNICEF Indonesia. (2021). *Education and Poverty: Barriers to Access*. Jakarta: UNICEF.
- YouthPower. (n.d.). *Multisectoral Collaboration*. YouthPower. Retrieved from [https://www.youthpower.org/sites/default/files/YouthPower/files/resources/multisectoral\\_collaboration.pdf](https://www.youthpower.org/sites/default/files/YouthPower/files/resources/multisectoral_collaboration.pdf).